

Peningkatan Kualitas Peran Wanita

Enny Achyani Busiri

Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani)

Apakah Kowani mempunyai program-program yang dinilai layak untuk dilaksanakan oleh lembaga eksekutif seperti, umpamanya Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita?

Saya perlu memberi gambaran latar belakang Kowani. Pada tanggal 22 Desember 1928 diadakan kongres perempuan Indonesia di Jakarta, dua bulan setelah Kongres Pemuda Oktober 1928. Sebagaimana diketahui bersama, Kongres Pemuda mendorong perjuangan ke arah kesatuan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Di sadari bahwa pergerakan wanita Indonesia memang ada dan karena itu diadakan kongres setelah Kongres Pemuda. Pergerakan wanita Indonesia secara sadar dirintis oleh tokoh-tokoh seperti RA Kartini, Dewi Sartika, Cut Nyak Dien, Cut Mutiah, dan sebagainya yang langsung maupun tidak langsung memberi inspirasi pada perjalanan pergerakan kaum wanita.

Dalam kiprahnya selama 50 tahun lebih, menurut pengamatan dan perasaan kami, pergerakan wanita selalu konsisten. Perbedaan hanya diwarnai oleh perbedaan strategi. Saat-saat menjelang akhir penjajahan Belanda, strategi perjuangan wanita adalah meningkatkan harkat dan martabat wanita untuk mencapai Indonesia Merdeka. Pada masa pendudukan Jepang, pergerakan wanita "dipusatkan" pada satu organisasi yakni Fujinkai. Walaupun organisasi wanita dilarang Jepang, secara diam-diam Fujinkai ikut dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia bersama-sama pemimpin bangsa. Banyak contoh zaman itu yang menunjukkan wanita atau kaum ibu yang turut berperan dalam mempersiapkan Dapur Umum. Menginjak Perang Kemerdekaan 1945-1950, strategi perjuangan kita adalah mempertahankan kemerdekaan

bangsa. Pergerakan wanita mencatat berbagai kegiatan dalam bidang pertahanan keamanan di garis depan dan belakang, di samping kegiatan sosial lainnya.

Kita kemudian memasuki pengaruh dan corak demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin serta gejolaknya sampai memasuki Orde Baru. Berlangsung perubahan dalam corak dan kegiatannya, namun satu hal pasti, nilai-nilai persatuan pergerakan wanita tetap dipertahankan. Motivasi perjuangan wanita bagaimanapun dan dimanapun demi persatuan dan kesatuan, apakah di forum Kowani yang sangat heterogen apalagi di forum regional ataupun internasional. Ambil contoh, dalam forum *International Council of Women Meeting*, kelihatan kita ini adalah satu meskipun yang berangkat ke forum itu utusan berbagai macam organisasi seperti Aisyah, wanita Islam, wanita Katolik, wanita Veteran, dan lain-lain. Bila sudah nama bangsa yang dipertaruhkan wanita akan bersatu.

Mengenai program memang diwarnai oleh perbedaan strategi. Sekarang kita menjalankan pembangunan dari Pelita ke Pelita berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam GBHN. Kowani pun melaksanakan program peningkatan peran wanita pada awal Orde Baru. Menjelang abad ke-21, kita sudah sampai pada taraf peningkatan kualitas peran. Dulu kita melulu harus berkiprah pada peningkatan peran di berbagai bidang. Sekarang kita tidak sekedar bicara peningkatan peran tetapi sudah pada program peningkatan kualitas peran. Misalnya, kami menangani generasi muda untuk mulai menerapkan kembali apa yang pernah dilakukan yakni mengantar tidur anak dengan cerita-cerita. Dulu pernah ada, namun kini wanita atau ibu-ibu muda yang sibuk berkarier lupa

"ngeloni anak." Kowani mengadakan lomba membuat cerita-cerita pengantar tidur anak. Setelah diperoleh kemudian di-inpreskan. Jadi, ini salah satu program mendasar yang akhirnya diakui oleh pemerintah.

Di bidang hukum, kami berusaha sedemikian rupa supaya wanita jangan buta hukum. Semua berawal dari buta hukum sehingga kita dibodohkan atau dilecehkan. Kami mencoba mengadakan kegiatan sadar hukum yang akhirnya dibuat merata dan turut dilaksanakan di tingkat nasional oleh pemerintah, baik melalui Dharma Wanita maupun Dharma Pertiwi. Kami juga membuat buku komik mengenai sadar hukum supaya rakyat mengerti, misalnya, kemana dia harus menyelesaikan masalah tanah.

Di bidang tenaga kerja kami menangani program yang sudah digariskan dalam Pelita. Namun kami sadar bahwa pembangunan nasional tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh pemerintah. Atas dasar itu, di samping melaksanakan program pembangunan nasional, kami juga melihat celah yang tidak tertangani pemerintah. Misalnya, ibu-ibu muda yang harus bekerja rumahan karena tidak tertampung dalam sektor formal. Pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja dan harus dibawa ke rumah tidak terkena peraturan perlindungan tenaga kerja. Kami mengupayakan meningkatkan keterampilan mereka atau memberi cara bagaimana memperoleh pinjaman bank supaya dapat mengerjakan yang lebih baik. Hal-hal demikian, antara lain, kami anggap sebagai program yang mungkin akhirnya diakui layak untuk wanita Indonesia.

Apakah peningkatan kualitas peran juga menyentuh bidang politik?

Jelas. Justeru hal-hal yang telah kami lakukan barangkali merupakan tujuan antara



Enny Achyani Busiri

untuk sampai menjadi *decision making position*. Kalau tidak, entah sampai kapan tiba di sana. Itu bukan soal kita ingin memecahkannya, tetapi harus diakui wanita sebenarnya memang sudah dipersiapkan untuk berperan bersama-sama sebagai salah satu sumber daya manusia. Hanya saja masih ada hambatan-hambatan interen yang harus dihadapi seperti pendidikan. Kalau sudah bisa diatasi kami melanjutkan dengan memecahkan hambatan dari luar seperti sosial-budaya, pengertian dari keluarga, suami, dan anak-anak.

Hambatan yang paling sulit dipecahkan?

Tergantung dari wanita itu sendiri. Sejauh mana dia dapat menunjukkan kemampuannya yang tidak akan mengganggu ketenangan lingkungan keluarga dan masyarakat. Patut dicatat bahwa kita tidak bisa dilepaskan dari lingkungan sosial-budaya. Kita dilahirkan berikut sosial-budaya di mana kita berada. Setelah beradaptasi dengan lingkungan tempat kita dibesarkan, kemudian dalam perkembangan selanjutnya kita juga akan memperoleh wawasan baru dan dapat melihat bahwa ini yang cocok dan berusaha untuk meyakinkan lingkungan. Semua harus dikembalikan kepada individu wanita. Dia harus mampu menunjukkan kemandiriannya:

Faktor sosial-budaya barangkali merupakan hambatan terbesar yang dihadapi wanita Indonesia. Wilayah kita begitu luas dengan daerah-daerah yang masih memiliki kultur sangat kuat. Meskipun demikian program-program yang dijalankan Kowani tetap menyentuh hal-hal yang mendasar dan berkesinambungan. Program-program pengurus sebelumnya yang belum selesai, tetap kami lanjutkan. Misalnya, dalam ekonomi koperasi kami bekerja sama dengan Peruri mempersiapkan motivator koperasi di seluruh Indonesia atau dengan IKIP Jakarta untuk membuka peluang seni di bidang mode.

Apakah tidak mungkin wanita Indonesia menduduki jabatan-jabatan strategis seperti misalnya, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Luar Negeri atau Menteri Keuangan?

Mungkin sekali. Dari pengalaman hidup selama ini soal yang menuntut ketelitian, kesungguhan, dan kejujuran adalah bidang-bidang wanita. Bagaimanapun wanita sudah biasa mengelola rumah tangga. Dengan uang yang pas-pasan pun dia tidak akan mencuri. Dia akan berusaha uang harus cukup untuk hidup selama sebulan. Kalau tidak cukup, dia akan mencoba menjual harta yang dimilikinya. Itulah kelebihan wanita. Wanita ingin hidup damai dan jujur. Jabatan-jabatan strategis mungkin sekali diraih oleh wanita. Pada dasarnya kelebihan wanita adalah ketelitiannya.

Apakah ketelitian dan kejujuran hanyalah stereotipe wanita?

Kelembutan mungkin stereotipe, tetapi ketelitian bukan. Karena profesi ibu rumah tangga membawa wanita menjadi begitu. Kowani saja dengan uang minim, dan tidak dari manapun termasuk dari APBN, tetapi kami tetap berusaha, dan saya betul-betul bangga, meskipun bekerja tidak ada yang digaji sama sekali.

Mengapa Ketua Umum Kowani senantiasa terpilih sebagai Menteri Negara UPW?

Saya tidak bisa menjawab karena itu merupakan hak prerogatif presiden.

Bagaimana keanggotaan, proses, dan mekanisme internal Kowani?

Kowani itu menghimpun organisasi wanita, bukan individual. Organisasi perempuan manapun berhak menjadi anggota Kowani. Organisasi wanita itu harus memiliki minimal 20 cabang yang sedikitnya berada di 14 provinsi. Meskipun, misalnya, organisasi A mengatakan sudah memiliki 20 cabang tapi hanya berada di 3 provinsi, mereka ini tidak bisa menjadi anggota Kowani. Organisasi perempuan yang masuk mendaftarkan diri sebagai organisasi wanita kedaerahan juga tidak bisa diterima Kowani. Organisasi wanita kedaerahan ini dipersilakan bergabung dengan BKOW di tingkat provinsi di mana kebetulan organisasi itu berada. Kami tidak *a priori* sehingga organisasi itu tidak bisa ke mana-mana. Kowani bukan tempat organisasi kedaerahan. Sekali menerima organisasi wanita kedaerahan berarti suatu kemunduran. Kita mendapat inspirasi dari Kongres Pemuda, kenapa sekarang harus menerima organisasi-organisasi kedaerahan.

Mekanismenya adalah, setiap lima tahun sekali diadakan kongres. Anggota Dewan Pimpinan sekarang berjumlah 25 orang, sebelumnya hanya 19, termasuk 11 Ketua Bidang. Bidang-bidang itu misalnya, organisasi, luar negeri, kesehatan, sosial kependudukan, lingkungan hidup, hukum, ekonomi koperasi, tenaga kerja, yayasan, dan lain-lain. Dari 70 organisasi anggota hanya 25 orang yang menjadi anggota Dewan Pimpinan. Ketua-ketua Bidang di *back-up* oleh suatu kepengurusan yang direkrut dari seluruh organisasi anggota. Setiap organisasi anggota dibatasi hanya boleh menempatkan dua orang untuk setiap bidang. Untuk menerima masukan, kita mengadakan minimal dua kali setahun pertemuan dengan pimpinan seluruh organisasi anggota untuk menyampaikan hasil-hasil rapat kerja Dewan Pimpinan dan program selama satu tahun yang diadakan pada tiap awal tahun kerja. Kita mengharapkan masukan dari organisasi anggota. Misalnya, masukan organisasi isteri veteran yang sudah sepuh-sepuh. Program tetap kami lakukan tetapi disesuaikan dengan keadaan melalui tukar pikiran mana yang menjadi keberatan mereka di samping mene-

rima masukan dari organisasi yang tidak terwakili dalam Dewan Pimpinan. Kita memang berbeda dengan KNPI yang memasukkan seluruh organisasi anggota ke dalam Dewan Pimpinan. Itu lagi contoh efisiensi dan ekonomis yang bisa dan ingin dilakukan wanita, namun terbuka. Kami juga mengadakan kunjungan kerja ke organisasi anggota sesuai dengan permintaan mereka.

Di samping itu Kowani mempunyai beberapa yayasan yang dibuat berdasarkan berbagai pertimbangan. Misalnya, ide dibentuknya *Yayasan Hari Ibu* adalah untuk dapat mendirikan satu Gedung Wanita Indonesia

yang direncanakan oleh pendahulu-pendahulu kita yang diadakan di Yogyakarta. Caranya adalah mengumpulkan uang dari anggota melalui penjualan bunga. Memang diperoleh banyak pemasukan, tetapi tidak juga bisa terkumpul. Namun perlahan-lahan dapat dibangun gedung yang lebih permanen dan pada tahun 1983 rakyat Indonesia, melalui presiden, menyerahkan Gedung Wanita Mandala Bhakti Wanita Tama di Yogyakarta kepada Yayasan Hari Ibu. Kemudian *Yayasan Sri Dharmas* di Yogyakarta memberi bantuan kepada pelajar putri Indonesia yang pandai namun kurang mampu. *Yayasan Kesejahteraan Anak dan Remaja* yang mengelola

TK dan sekolah, *Yayasan Bina Kerta* yang menyiapkan tenaga kerja wanita dengan meningkatkan keterampilan mereka, *Yayasan Daya Wanita* untuk menampung dan memasarkan hasil kerajinan organisasi-organisasi anggota di samping mengelola satu rumah manula. Kami juga memiliki *Yayasan Lembaga Bantuan Masalah Keluarga* yang menangani konsultasi hukum keluarga. Jadi, dari program-program bisa dilihat visi Kowani yaitu terbentuknya wanita Indonesia dengan harkat dan martabat yang tinggi dalam melaksanakan kodratnya secara dinamis sesuai tuntutan. Kita tidak apriori karena kodrat lalu membatasi diri.

Persoalan apa saja yang senantiasa menjadi sumber perbedaan pendapat di dalam Kowani?

Pada dasarnya tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada yang namanya persoalan prinsipil. Kalaupun ada hanya pada prioritas pelaksanaan program. Dana dan anggaran kami memang sangat terbatas. Kami memiliki beberapa program prioritas yang telah menjadi kesepakatan kongres dan harus dilaksanakan. Pelaksanaan program juga disesuaikan dengan kebutuhan. Umpamanya, program Keluarga Berencana yang tidak mungkin dijalankan sepenuhnya oleh organisasi anggota kami yang sudah sepuh. Tidak terlampau *strike*, tetapi begitu ada kesepakatan maka tetap harus dilaksanakan. Kowani, yang juga anggota organisasi wanita tingkat internasional seperti *International Council of Women*, sering mendapat tawaran beasiswa, seminar dan bermacam kegiatan. Kami kemudian menawarkan undangan tersebut kepada organisasi anggota sesuai dengan latar belakang kegiatan mereka. Kami ini sangat transparan dan memikirkan pemerataan.

Bagaimana peran Kowani dalam menangani masalah tenaga kerja wanita (TKW)?

Kami sudah sejak lama menangani masalah itu. Sekarang ini kami sudah sampai tahapan menagih janji Menteri Tenaga Kerja supaya menghentikan pengiriman TKW pembantu rumah tangga. Jadi, maaf saja, kadang-kadang pemerintah tidak jujur. Misalnya, PJTKI seharusnya ditindak tetapi ternyata tidak dilakukan. Kenapa? Ternyata ada orang "mereka" yang duduk di situ. Kami pernah mengundang mereka berdiskusi. Selama ini yang menjadi korban adalah manusia perempuan, bukan kambing. Perempuan memang bisa meningkatkan devisa tetapi caranya tidak demikian. Barangkali apa yang Kowani sampaikan dalam diskusi itu terlalu keras. Yang penting bukan terdengar vokal, tetapi harus ada

Sekarang kita menjalankan pembangunan berdasarkan ketentuan GBHN. Kowani pun melaksanakan program peningkatan peran wanita pada awal Orde Baru. Menjelang abad ke-21, kita sudah sampai pada taraf peningkatan kualitas peran.

solusi. Persoalan yang berkaitan dengan departemen tertentu pasti akan kami sampaikan kepada menteri bersangkutan, tidak harus melalui Menteri Negara UPW. Kalau perlu kami juga melapor dan minta tolong Ibu Mien Sugandhi untuk menanyakan kepada menteri bersangkutan.

Dalam forum internasional Kowani harus bersatu suara. Barangkali sulit menyatukan pendapat dengan NGO wanita lain yang juga hadir dalam forum itu?

Kowani sudah menjadi anggota *International Council of Women* sejak 1973. Saya pertama kali menghadiri kongresnya pada tahun 1976 di Vancouver dengan Ibu Lasiah sebagai Ketua Umum Kowani. Pada tahun 1994, salah seorang ketua Kowani terpilih sebagai Presiden ICW. Di dalam ICW, seperti juga di forum Asean melalui ACWO (*Asean Confederation of Women's Organizations*), di samping membawakan aspirasi wanita Indonesia, Kowani juga menjadi corong pemerintah. Program-program pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia melalui GBHN dan Pelita merupakan kebanggaan tersendiri dan diakui ICW sangat konseptual dan sistematis. Kowani sebenarnya NGO, tetapi secara tidak langsung dunia luar tahu pelaksanaan program kami berdasarkan *guide lines* yang disetujui bangsa Indonesia melalui Sidang Umum MPR.

Mengenai LSM yang lain, memang sebelum periode kami yang sekarang selalu berangkat sendiri-sendiri ke forum internasional. Sama-sama saling tidak mengetahui. Hal berbeda ketika hendak menghadiri Konferensi Perempuan di Beijing. Kami menempuh strategi dengan mengadakan lokakarya bersama-sama LSM lain. Kita membicarakan persiapan materi ke Beijing. Walaupun berbeda strategi dalam mencapai tujuan, tetapi kita tetap harus tampil bersatu. Di samping itu dana yang akan diminta dari *UN Foreign Agencies* dapat betul-betul bermanfaat. Kita sepakat mendirikan satu forum komunikasi perempuan dalam pembangunan. Mereka yang sepakat adalah orang dari Kowani, LSM dan dari mana saja lalu bersama-sama ke Beijing untuk menggolkan perjuangan. Kali ini anggota DPR yang berangkat pun satu

dalam delegasi organisasi wanita Indonesia. Dalam pelaksanaan, Kowani pun wajib sosialisasikan kepada organisasi anggota bahwa kita bekerja sama melalui forum itu. Yang menjadi anggota forum komunikasi perempuan bukan Kowani tetapi perorangan. Kalau Kowani berarti saya harus mempertanggungjawabkan kepada kongres. Dalam forum internasional kita membawakan suara rakyat, walaupun demikian tentu tidak dapat dihindari di sana-sini pasti sedikit melenceng karena perbedaan gaya.

Apakah ada keinginan Kowani untuk memperjuangkan lebih banyak jumlah wanita yang duduk dalam lembaga legislatif?

Pasti. Itu so pasti. Misalnya menaikkan persentase wanita sampai 25%. Jangan sampai 50% karena bisa dianggap terlalu berlebihan dan ambisius. Kita hanya menunjukkan bahwa kita mampu. Cukup 25% tetapi tunjukkan orang yang *capable* dan, yang terpenting, betul-betul membawa aspirasi rakyat yang diwakilinya.

Bagaimana peran Kowani dalam mengoptimalkan peran mereka sebagai politikus yang berkemampuan daripada sekedar aksesoris politik?

Kowani memberi kesempatan kepada semua anggota, tidak hanya dari Dewan Pimpinan. Ada yang berkualitas, tapi ada pula yang kurang pandai. Dalam pelbagai acara di tingkat nasional ataupun seminar di tingkat regional kami berusaha memberikan dan menunjukkan kepada setiap anggota kemampuan berdiskusi atau berdialog yang harus dimiliki seorang politikus. Di samping itu pula harus ditunjukkan kemampuan yang menjunjung tinggi nasionalisme bangsa. Dalam forum-forum demikian kami berusaha mengoptimalkan tampilnya mereka sebagai politisi.

Bagaimana kelebihan dan kelemahan wanita dalam memimpin organisasi yang penuh dengan trik politik dan kekerasan?

Sebagai wanita yang kebetulan pernah memimpin bermacam organisasi baik sewaktu mendampingi suami sebagai pejabat maupun sekarang setelah sendiri, saya berangkat dari

sifat wanita secara umum. Umumnya wanita tidak suka perang atau cekcok. Wanita itu transparan dan selalu ingin terbuka. Menutup-nutupi berarti akan menimbulkan konflik. Padahal trik-trik politik berkonotasi negatif, dan jelas wanita tidak suka. Sebagai bukti misalnya, Margareth Thatcher atau Indira Gandhi, yang dijuluki wanita bertangan besi karena mempunyai konsep yang sangat transparan, tidak pakai trik, sehingga untuk menggolkan semuanya dia harus bertangan besi. Rasanya trik-trik politik tidak diperlukan oleh wanita, dan itu bukan kiat wanita dalam memimpin organisasi apapun.

Apakah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari 20% menjadi 25% juga harus menghindari trik politik?

Memang harus masuk ke dalam untuk mampu mengatasi trik-trik politik yang penuh kekerasan. Kita harus mengerti, tapi jangan lantas masuk ke situ untuk menimbulkan kekerasan. Saya sendiri merasakan demikian di DPR. Kadang-kadang untuk bisa menggolkan sesuatu, kita harus memuji orang yang sebenarnya tidak kita sukai. Artinya, secara umum tidak kita lakukan, tetapi seorang politisi sudah sangat mengerti trik-trik itu perlu atau tidak dipakai. Barangkali kalau terpaksa dan itu yang terakhir digunakan kaum wanita. Tetapi secara umum kita lebih suka transparansi. Sebagai wanita politisi seharusnya tahu trik politik, namun dipakai untuk membuat kita semakin waspada.

Bagaimana tanggapan Anda tentang keberadaan ideologi patriarki yang menjadi kendala bagi wanita Indonesia untuk tampil?

Kendala sosial-budaya seharusnya terpulang pada individu sejauh mana dia mampu menunjukkan dirinya sebagai orang yang mandiri. Wanita harus bisa menunjukkan kemampuan dalam menghadapi segala hal dan

menentukan bahwa itu adalah pilihannya. Kalau sudah menjadi pilihan, maka dia harus konsekuen. Segala macam harus dihadapinya, tidak boleh cengeng. Kalau sudah menentukan pilihan maka lakukanlah dengan baik dan positif. Jadi, semuanya sangat tergantung dari kemampuan wanita secara individu.

Artinya perubahan dan kemajuan yang diinginkan wanita harus selalu melihat kondisi obyektif?

Perubahan bukan tergantung dari kita sendiri, tetapi juga tergantung pada keadaan yang hendak kita ubah. Untuk mempertemukan dua pendapat membutuhkan waktu yang lama. Kultur budaya itu memang sulit untuk diubah. Untuk generasi ke atas sudah tidak ada dan tidak laku. Produk lama ini tidak bisa mengubah, dia hanya dapat menyesuaikan. Kita hanya dapat bicara pada generasi ke bawah. Kita lihat juga sosial budaya seperti yang lalu. Dulu, walaupun sudah sarjana, kalau mau bekerja kita harus bertanya lebih dahulu kepada orang tua. Sekarang tidak begitu. Jadi bukan karena pemikiran moderen tetapi juga tergantung kebutuhan. Kita tetap menganggap yang mendasari berkarya adalah keluarga. Ketahanan keluarga itulah yang harus terus dijaga dan ditingkatkan.

Bagaimana mempertemukan nilai-nilai keluarga yang telah lama tertanam, sementara anak-anak berada pada situasi dan kondisi yang berbeda?

Yang harus kita pertahankan adalah nilai-nilainya. Umpamanya kejujuran dan kejujuran pasangan suami-isteri. Itu adalah nilai-nilai keumuran yang menjaga kesakralan institusi pernikahan. Bukan berarti sang isteri tidak boleh bertugas atau bekerja. Kowani berangkat dari keluarga harmonis, tetapi tidak berarti menjadi kuno. Semangat nilai-nilai lama harus tetap kita miliki. Misalnya, semangat perjuang-

Secara universal, perempuan yang dapat menjatuhkan seorang pejabat ada di mana-mana, tidak hanya di Indonesia. Karena itu bukan tanpa sebab lahir kata-kata mutiara seperti Harta, Tahta, dan Wanita.

an 1945 harus tetap dimiliki karena itu merupakan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kalau sudah kabur maka terjadi seperti di Rusia atau Yugoslavia. Saya yang kebetulan wakil dari Irian Jaya pernah mengatakan "ayo kita introspeksi diri apakah selama ini kita agak melupakan pembinaan nasionalisme bangsa." Mungkin sudah tergeser atau bahkan lupa karena globalisasi. Barangkali nilai kejujuran itu sudah agak renggang sehingga terjadilah seperti yang sekarang ini berlangsung.

Era globalisasi pasti membawa nilai-nilai tersendiri. Bila dihadapkan dengan nilai-nilai kejujuran apakah bukan malah semakin menjauh dengan gagasan keluarga harmonis?

Menurut saya nilai-nilai ketimuran itu tetap, hanya tentu tergantung pada kita untuk menghadapinya. Anak-anak kadang-kadang sangat bersifat konsumtif. Mau tidak mau harus kita hadapi dengan nilai-nilai yang selama ini diajarkan bahwa hidup itu *sak cukupe*, tidak usah terlalu *royal*. Sekarang memang sudah bergeser. Karena itu pengaruh *Kentucky fried chicken*, *Mac Donald* dan segala macam, bagi kami juga merupakan persoalan. Untuk sekarang kembali saja pada yang tradisional dan hidup wajar. Untuk mencegah pengaruh dari luar nampaknya dapat dikembalikan pada ketahanan keluarga yang menyangkut semua aspek, termasuk agama dan P4.

Bagaimana penilaian Anda terhadap kasus atau skandal yang menjatuhkan seorang pejabat tetapi senantiasa mempersalahkan wanita?

Secara universal, perempuan yang dapat menjatuhkan seorang pejabat ada di mana-mana, tidak hanya di Indonesia. Karena itu bukan tanpa sebab lahir kata-kata mutiara seperti Harta, Tahta, dan Wanita. Kasus-kasus semacam ini pun bersifat universal yang dapat menyentuh siapapun dan dimanapun. Untuk tidak selalu dipersalahkan, wanita harus diusahakan untuk mandiri sehingga tidak gampang *diiming-imingi* uang dan harta. Perempuan mesti dipersalahkan, padahal yang bermoral bejat adalah laki-laki juga. Itu tidak adil. Jadi, kita harus membekali wanita dengan berbagai kemampuan dan keterampilan untuk

bisa mengarah kepada kemandirian. Sebagai wanita kita seharusnya merasa bersyukur mempunyai peran menentukan dalam konteks kejayaan dan kehancuran negara. Alternatif supaya wanita tidak dipersalahkan maka dia harus mandiri. Untuk *law enforcement* memang belum seluruhnya berpihak pada wanita. Ini merupakan faktor lain yang kita sendiri tidak tahu mengapa sampai terjadi demikian.

Bagaimana tanggapan Anda dengan menonjolnya berita-berita kekerasan yang menimpa wanita?

Kami mengharapkan media massa jangan selalu memberikan persepsi yang menekankan wanita sebagai korban yang ditampilkan secara berlebihan dan tidak pantas. Tetapi tampaknya berita-berita kekerasan yang menimpa wanita menarik perhatian masyarakat. Kowani sendiri, dengan adanya kasus-kasus pelecehan seksual dan sebagainya, sedang memperkuat Yayasan Lembaga Bantuan Masalah Keluarga dengan membuat *women crisis center*. Kami menyebutnya Sahabat Perempuan yang membantu wanita-wanita yang entah dianiaya suami atau mengalami tindak kekerasan lainnya. Kita sendiri dengan data lengkap mendatangi kepolisian supaya perkara yang menimpa wanita betul-betul ditangani. Problem lain adalah kultur yang cenderung tidak mau melaporkan *domestic violence* karena malu. Tetapi kami mendorong perempuan-perempuan yang merasa teraniaya untuk lapor dan tidak usah takut. Dalam hal demikian kami langsung menghadap pengadilan, karena memang nyatanya begitu. Sementara ini kami tidak mengalami kesulitan.

Apakah tidak ada upaya Kowani menghentikan *domestic violence*?

Sulit. Kita ini hanya melihat dan menangani kasus per kasus berdasarkan laporan. Selama ini wanita atau ibu-ibu yang datang ke Sahabat Perempuan sangat terbuka, namun nama mereka dirahasiakan. Mereka yang mengelola Sahabat Perempuan selalu memasukkan laporan ke Kowani tentang kasus-kasus yang belum dan sudah ditangani. Bila ada kasus yang tersendat-sendat, misalnya aparat kurang membantu, kita lang-

sung melakukan upaya pengadilan. Jadi, usaha Kowani di semua aspek sudah dipikirkan.

Apakah wanita Indonesia siap tampil sebagai pemimpin bangsa dan apa kriteria yang harus dimiliki?

Berbicara pemimpin bangsa bukan berarti hanya presiden dan wakil presiden. Memimpin di manapun sudah dapat dikatakan pemimpin bangsa. Wanita Indonesia sekarang pun terlihat banyak yang memimpin berbagai organisasi. Kita telah memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan setinggi mungkin.

Mengapa belum bisa tercapai persentase yang sama, seharusnya terpulang pada diri kita sendiri. Terus terang, hambatan-hambatan yang dihadapi sebagian besar wanita karena dia terutama harus mendahulukan kepentingan keluarga. Dia, misalnya, tidak mau konflik dengan suami. Itu saya anggap sebagai kultur yang diterima wanita dengan ikhlas. Kalau dia seorang ibu rumah tangga yang benar, pasti mendahulukan keluarga daripada memikirkan karier. Bukan berarti dia tidak mampu. Saya anggap wanita memiliki kemampuan dan kesanggupan. Sementara itu kriteria nomor satu yang harus dimiliki seorang wanita untuk menjadi pemimpin bangsa adalah moral. Dia juga harus memiliki kemampuan dan kemandirian.

Bagaimana tanggapan Anda dengan UUD 1945 yang tidak mengenal istilah emansipasi atau bahkan diskriminasi wanita-pria?

UUD jelas mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Barangkali yang sekarang dituntut, persepsi mengenai emansipasi yang belum sama. Persepsi kelompok tertentu terhadap emansipasi adalah mempunyai hak yang sama untuk hal-hal yang sebetulnya tabu bagi wanita. Misalnya soal poliandri. Tidak mungkin wanita melakukan

poliandri. Kalau tuntutan emansipasi semata-mata diartikan demikian jelas tidak bisa diterima. Kalau itu yang dimaksud, mana mungkin wanita mempunyai dua suami. Sudah menyangkut moral. Kowani tidak ada masalah dan tidak mempermasalahkan emansipasi karena sudah jelas. Yang kita masalahkan adalah pemerataan kesempatan untuk lebih banyak diberikan kepada wanita sesuai dengan kebutuhan.

Juga mengenai persamaan upah kerja yang kita lihat masih berlangsung diskriminasi di beberapa perusahaan. Kadang-kadang yang kita sesalkan, ada wanita pengusaha yang justru memberlakukan perbedaan upah. Bidang tenaga kerja Kowani sering mengadakan kunjungan *on the spot* pada perusahaan tertentu. Bahkan di Yogyakarta dan Solo kami jumpai buruh-buruh wanita yang makan nasi dan bawang goreng secara sembunyi-sembunyi. Ironisnya pemilik perusahaan itu adalah wanita. Yang begini tidak kami sukai. Seorang wanita justru memperlakukan tenaga kerja perempuan yang bekerja untuknya secara demikian.

Sejauh mana aspirasi politik Kowani, sebagai salah satu organisasi yang menghimpun sebagian besar organisasi wanita Indonesia, disalurkan?

Kowani bukan merupakan partai politik, bukan juga bagian dari Golongan Karya. Kami menghimbau pimpinan Parpol dan Golkar untuk dapat mengusahakan lebih banyak wanita yang dapat terpilih. Kepada organisasi anggota, pimpinan juga menganjurkan agar wanita diajukan sebanyak-banyaknya. Jangan sekedar kuantitas, tetapi juga kualitas. Organisasi anggota Kowani bebas menyalurkan aspirasi politiknya. Tidak ada keharusan memilih organisasi sosial politik tertentu. Juga di forum-forum lain, soal itu adalah hak masing-masing anggota untuk menyalurkan aspirasinya. ●

Berbicara pemimpin bangsa bukan berarti hanya presiden dan wakil presiden. Memimpin di manapun sudah dapat dikatakan pemimpin bangsa. Wanita Indonesia sekarang pun terlihat banyak yang memimpin berbagai organisasi.